



## Analisis Investasi Dalam Negeri, Upah Minimum, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur

Nadia Afny Zuraida<sup>1\*</sup>, Kiky Asmara<sup>2)</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email : [nadiaafnyz@gmail.com](mailto:nadiaafnyz@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The main goal in the global Sustainable Development Goals (SDGs) agreement is to end poverty. Appropriate and efficient government intervention is needed to reduce poverty. This research analyzes the influence of domestic investment, minimum wages and government spending in reducing poverty in East Java. Multiple linear regression analysis was used as parameter estimation for this research. The data used a time series period 2008-2022. The results show that there is a significant negative relationship between domestic investment and government spending on the poor people. This means that when domestic investment and government spending increase, it will reduce the poor people in East Java. However, this is different from the minimum wage which has a positive and significant relationship to the poor people. When the minimum wage increases, it has no effect on the number of poor people in East Java. So it can be concluded that the government can optimize domestic investment and government spending to end the problem of poverty in East Java.*

**Keywords:** *Domestic Investment, Provincial Minimum Wage, Government Expenditures, and Poor People*

### ABSTRAK

Tujuan utama dalam kesepakatan global Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menyelesaikan kemiskinan bentuk apapun. Diperlukan intervensi pemerintah secara tepat dan efisien dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menganalisis pengaruh adanya investasi dalam negeri, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Analisis regresi linier berganda dijadikan sebagai estimasi parameter untuk penelitian ini. Digunakan data *time series* periode 2008-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara investasi dalam negeri dan pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya ketika investasi dalam negeri dan pengeluaran pemerintah naik, maka akan menurunkan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Namun berbeda dengan upah minimum yang memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penduduk miskin. Ketika upah minimum meningkat, tidak berpengaruh dengan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah dapat mengoptimalkan adanya investasi dalam negeri dan pengeluaran pemerintah untuk mengakhiri masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

**Kata Kunci:** *Investasi Dalam Negeri, Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk Miskin*

**PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan meningkatkan pembangunan nasional melalui terciptanya lapangan pekerjaan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat sehingga menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan dideskripsikan sebagai kurangnya pendapatan seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidup pokoknya (Mubyarto, 2004). Tolak ukur menentukan individu tergolong miskin atau tidak dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara pendapatan/konsumsi seseorang dengan standar yang telah ditentukan. Artinya, seseorang akan dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi standar tersebut (Haughton & Khandker, 2012). Sedangkan menurut BPS mendefinisikan kemiskinan menjadi keadaan individu terbatas dalam mencukupi hidupnya sehari-hari. Berbeda dengan teori Nurkse, bahwa kemiskinan disebabkan oleh tiga hal yaitu ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan dan keterbatasan modal. Apabila modal rendah maka produktivitas akan rendah sehingga menyebabkan munculnya kemiskinan. Adanya kemiskinan akan membuat tabungan dan investasi menurun. Penyebab kemiskinan akan terus berhubungan dalam lingkaran setan.

Kemiskinan menjadi tolak ukur dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diperhatikan upaya pengentasan kemiskinan secara komprehensif. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang yang dikatakan dalam kategori miskin jika rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulan suatu rumah tangga berada dibawah garis kemiskinan. Menurut Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN, kemiskinan dapat ditinjau dari kemampuan seseorang dalam memenuhi sandang, pangan, dan papan. Apabila suatu rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, maka rumah tangga tersebut dikategorikan miskin. Kemiskinan juga sering disebut sebagai keadaan seseorang yang kekurangan uang dan barang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Pengeluaran seseorang dapat mencerminkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya (Annisa & Anwar, 2021).

Masalah kemiskinan menjadi isu kritis secara global bagi semua negara. Penurunan kemiskinan sudah termasuk dalam tujuan pembangunan negara, sehingga diperlukan kebijakan yang menyeluruh dan teratur dalam mengatasi masalah ini (Wicaksana & Primandhana, 2023). Masalah kemiskinan pastinya juga terjadi di negara Indonesia. Sebagai negara berkembang, isu kemiskinan berkembang menjadi berbagai konsekuensi sosial maupun ekonomi. Perlu adanya kebijakan secara terus-menerus dan intensif serta keterlibatan banyak pihak dalam memerangi kemiskinan (Alvin & Hukom, 2023). Dalam menanggulangi kemiskinan diperlukan suatu program pembangunan yang produktif melalui pendampingan secara intensif sehingga dapat meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin (Yustika, 2006).

Dalam Kuncoro (2010), Ragnar Nurkse dalam teori lingkaran setan kemiskinan menjelaskan fenomena lingkaran setan kemiskinan di negara-negara

miskin. Teori ini dimulai dari produktivitas yang rendah disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar dan modal yang terbatas. Produktivitas rendah berimplikasi pada perolehan upah yang rendah. Rendahnya upah yang diterima akan membuat pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat dikatakan sebagai penduduk miskin. Dalam teori ini juga dijelaskan salah satu penyebab kemiskinan adalah keterbatasan modal. Adanya modal yang terbatas akan menghambat kreativitas masyarakat, sehingga akan membuat lapangan pekerjaan akan berkurang dan tidak cukup menampung banyaknya tenaga kerja yang terus bertambah sehingga hal ini tentu akan meningkatkan jumlah kemiskinan.

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya memerangi isu kemiskinan. Pada tahun 2022, BPS menyebutkan jumlah penduduk di Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa dengan 55,94% atau sekitar 154,28 juta jiwa merupakan penduduk Pulau Jawa. Penduduk miskin mencapai 4.181,29 ribu jiwa menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Adanya kemiskinan yang tinggi di Provinsi Jawa Timur membuat pemerintah terus berupaya dalam menurunkan angka kemiskinan. Basri (2002) menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan, sangat penting untuk melakukan restrukturisasi terhadap sistem yang otoriter dan monopoli dengan strategi memperkuat posisi politik dan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin. Penguatan politik melibatkan revisi aturan yang semula membatasi untuk lebih memfasilitasi, sementara dalam penguatan ekonomi, fokusnya adalah mengubah struktur ekonomi yang monopoli menjadi lebih adil dan mendukung, sehingga akses kelompok masyarakat miskin terhadap sumber daya dapat ditingkatkan.

Investasi merupakan penanaman suatu aset yang dilakukan oleh pihak investor yang digunakan guna memberi barang-barang produksi dengan tujuan menambah aset perusahaan guna menaikkan produksi dari segi kuantitas maupun kualitas untuk kedepannya. Dalam Teori Harrod-Dommar menjelaskan bahwa investasi sangat berperan dalam perekonomian suatu wilayah. Investasi menjadi indikator yang harus dipenuhi dalam menciptakan pertumbuhan yang teguh dalam jangka panjang. Teori ini menjelaskan adanya investasi yang rendah akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya pendapatan masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang tidak lagi produktif (Murni, 2016).

Tiap negara akan berusaha menciptakan iklim yang mendorong investasi untuk menumbuhkan perekonomian suatu wilayah salah satunya dengan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga akan mengurangi pengangguran dan membebaskan masyarakat dari lingkaran kemiskinan. Salah satu bentuk investasi adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Menurut UU No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ialah kegiatan penanaman suatu aset oleh investor dalam negeri dan dilakukan di dalam negeri. Pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Timur didorong melalui investasi dalam negeri. Pada tahun 2022, realisasi PMDN tertinggi ketiga

Nadia Afny Zuraida, Kiky Asmara.

*Analisis Investasi Dalam Negeri, Upah...*

hlm. 552-563

di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur dengan 4.311 proyek atau sebesar 65,4 triliun.

Kemiskinan dapat disebabkan karena adanya upah yang rendah di suatu wilayah. Upah minimum merupakan standar terkecil bagi pelaku industri dalam membalas jasa pekerja di lingkungan kerja (Putri & Putri, 2021). Dalam Teori Upah Besi yang dikemukakan oleh David Ricardo (1772-1823) menjelaskan tingkat upah pekerja akan meningkat apabila harga barang yang dibutuhkan oleh pekerja juga meningkat (Jhingan, 2016). Adanya kualitas manusia yang rendah akan berimplikasi terhadap penurunan produktivitas, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat upah para pekerja (Islami & Anis, 2019). Menurut Todaro & Smith (2014), adanya penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Berdasarkan PP No. 8/1981, upah minimum dikelompokkan sebagai regional, sektoral regional, dan sub sektoral. Penetapan upah minimum digunakan pemerintah sebagai taraf terendah seorang pengusaha dalam memberikan gaji kepada pekerja sesuai dengan taraf hidup di wilayah tersebut. Adanya penetapan upah minimum diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja sehingga menjauhkannya dari jurang kemiskinan (Wiadnyana & Hadiyati, 2023).

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan secara desentralisasi, sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya masing-masing. Setiap daerah memiliki kemandirian fiskal daerah yang mengacu pada kemandirian pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan melalui pajak daerah, retribusi, dan sumber daya alam (Risdiyanto et al., 2023). Teori Wagner menjelaskan pengeluaran pemerintah akan mendorong sektor pendidikan dan kegiatan pemerintah lainnya sehingga mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut (Mangkoesebroto, 2014).

Mankiw (2018) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah atau disebut juga belanja pemerintah yang diartikan sebagai kegiatan pemerintah dalam melakukan belanja barang dan jasa, termasuk biaya upah pegawai. Disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah atau *government expenditure* ialah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembiayaan program-program pemerintah dengan tujuan menstabilkan perekonomian di suatu wilayah. Adanya pengeluaran pemerintah dapat dilihat melalui realisasi belanja di setiap daerah. Pada tahun 2022, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur mencapai 94,02% dengan anggaran sebesar 31,5 triliun rupiah, sehingga menjadikannya sebagai provinsi dengan realisasi belanja terbesar ke-10 di Indonesia. Semakin besar realisasi belanja daerah, mengindikasikan bahwa semakin banyak program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Suparmoko, 2016).

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, pokok pembahasan utama mengenai permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dalam mengentaskan fenomena ini, penulis ingin analisis lebih lanjut tentang dampak investasi dalam negeri, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah yang menjadi faktor penting dalam penurunan angka kemiskinan. Maka penulis akan

mengambil penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Upah Minimum, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data *time series* yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Variabel independen pada penelitian ini meliputi PMDN, upah minimum provinsi, dan belanja daerah, sedangkan variabel dependennya adalah jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur dengan periode tahun 2008 hingga 2022. Penelitian ini disusun secara kuantitatif dengan melakukan analisis regresi berganda menggunakan Eviews. Persamaan regresi berganda yang digunakan sebagai berikut.

$$JPM = \alpha + \beta_1 X_1(\text{PMDN}) + \beta_2 X_2(\text{UMP}) + \beta_3 X_3(\text{BD}) + e$$

Dimana :

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| JPM                         | : Jumlah Penduduk Miskin                         |
| $\alpha$                    | : Konstanta                                      |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ | : Koefisien regresi masing-masing variabel       |
| e                           | : Variabel Pengganggu atau <i>Standart Error</i> |
| $X_1(\text{PMDN})$          | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)            |
| $X_2(\text{UMP})$           | : Upah Minimum Provinsi (UMP)                    |
| $X_3(\text{BD})$            | : Belanja daerah                                 |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memakai analisis regresi linier berganda. Dilanjutkan Uji Asumsi Klasik, sehingga menciptakan model regresi yang sesuai kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Uji Asumsi Klasik mencakup Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, dan Uji Autokorelasi.

### Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2017), uji multikolinieritas menganalisis hubungan yang signifikan dalam variabel independen. Uji ini dilihat melalui nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) berikut.

**Tabel 1** Uji Multikolinieritas

| Variabel | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
|----------|----------------------|----------------|--------------|
| PMDN     | 5.97E-17             | 18.66055       | 2.273779     |
| UMP      | 0.070915             | 19.73800       | 2.796930     |
| BPD      | 9.53E-17             | 8.175276       | 1.672392     |

Sumber : Output Eviews, 2024

Terlihat pada **Tabel 1** bahwa nilai keseluruhan variabel (*Centered VIF*) dibawah 10. Disimpulkan model tersebut tidak mengalami gejala

### Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2017), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mencegah adanya kesamaan varian pada model regresi. Uji ini dapat dilihat melalui Uji *Breusch-Pagan* melalui nilai signifikansi.

**Tabel 2** Uji Heteroskedastisitas

| Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey |          |                     |        |
|--|----------|---------------------|--------|
| F-statistic                                    | 0.512221 | Prob. F(3,11)       | 0.6821 |
| Obs*R-squared                                  | 1.838604 | Prob. Chi-Square(3) | 0.6066 |
| Scaled explained SS                            | 0.339206 | Prob. Chi-Square(3) | 0.9525 |

Sumber : Output Eviews, 2024

Dari **Tabel 2** menunjukkan nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,9525 dan lebih besar dari 0,05, dan disimpulkan bahwa bebas dari heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2017), uji normalitas guna melihat persamaan regresi sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini membandingkan nilai *Jarque-Bera* (JB). Nilai *probability* dari data tersebut sebesar 0,550858 atau lebih besar dari 0,05 ( $0,550858 > 0,05$ ), sehingga uji normalitas terpenuhi dan data terdistribusi normal.

### Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2017), uji autokorelasi untuk menyelidiki adanya korelasi antar residual model regresi periode sekarang dari periode sebelumnya. Uji ini dapat dilihat menggunakan *LM test* atau uji *Breusch Godfrey* sebagai berikut.

**Tabel 3** Uji Autokorelasi

| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test |          |                     |        |
|--|----------|---------------------|--------|
| F-statistic                                | 0.229481 | Prob. F(2,9)        | 0.7995 |
| Obs*R-squared                              | 0.727819 | Prob. Chi-Square(2) | 0.6950 |

Sumber : Output Eviews, 2024

Terlihat pada **Tabel 3** bahwa nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,6950 dan lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian asumsi klasik sebelumnya menghasilkan bahwa tidak ada isu multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Oleh karena itu, hasil pengujian tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan analisis regresi linear berganda. Maksud uji ini mengidentifikasi adanya pengaruh antara investasi dalam negeri, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis, berikut persamaan yang akan digunakan.

$$\text{Jumlah Penduduk Miskin} = 6661245,0 - 1,79\text{E-}08 X_1 - 0,484963 X_2 - 2,33\text{E-}08 X_3 + e$$

Interpretasi persamaan diatas sebagai berikut :

1.  $\beta_0 = 6661245,0$ , ketika variabel-variabel bebas dianggap konstan, maka nilai dari jumlah penduduk miskin (Y) meningkat adalah 6661245,0%.
2.  $\beta_1 = 1,79\text{E-}08 X_1$ , ketika investasi dalam negeri mengalami kenaikan 1 satuan maka jumlah penduduk miskin berkurang 1,79E-08%.
3.  $\beta_2 = -0,484963$ , ketika upah minimum mengalami kenaikan 1 satuan maka jumlah penduduk miskin berkurang -0,484963%.
4.  $\beta_3 = -2,33\text{E-}08$ , ketika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan 1 satuan maka jumlah penduduk miskin berkurang 2,33E-08%.

Setelah dilakukan analisis linier berganda, maka dilanjutkan dengan Uji Hipotesis. Maksud dari uji ini adalah mengetahui adanya hubungan yang signifikan antara variabel dalam penelitian. Uji Hipotesis melalui Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji Simultan F, dan Uji Parsial (Uji T).

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2017), uji ini dilihat melalui koefisien *R-Squared*. Nilai yang diperoleh dari analisis sebesar 0,863888 atau 86,38%. Hal ini menunjukkan meskipun 86,38% variasi jumlah penduduk dijelaskan oleh investasi dalam negeri, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin. Namun sisanya 13,62% disebabkan oleh variabel lain yang tidak terhitung.

### Uji Simultan F

Uji F dilakukan guna menganalisis pengaruh secara simultan pada variabel terikat (Ghozali, 2017). Nilai F-hitung sebesar 23.27190 dan nilai F-tabel sebesar 3.708. Disimpulkan bahwa F-hitung > F-tabel. Selain itu, nilai *F-statistic* adalah 0.000046 ( $0.000046 < 0.05$ ). Disimpulkan bahwa investasi dalam negeri, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah secara simultan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

### Uji Parsial (Uji T)

Uji T diperlukan untuk menjelaskan pengaruh setiap variabel secara parsial. Nilai probabilitas < 0,05 memperlihatkan bahwa variabel dependen terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel independen. Apabila nilai probabilitas > 0,05 menunjukkan secara parsial variabel dependen tidak adanya pengaruh signifikan terhadap variabel independen (Ghozali, 2017).

Tabel 4 Uji T

| Variabel | t-Statistic | t-tabel | Probability |
|----------|-------------|---------|-------------|
| PMDN     | -2.315618   | 1,79588 | 0.0409      |
| UMP      | -1.821120   | 1,79588 | 0.0959      |
| BPD      | -2.390617   | 1,79588 | 0.0358      |

Sumber : Output Eviews, 2024

### Pengaruh Investasi Dalam Negeri terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Nilai t-hitung dari investasi dalam negeri yang diperoleh sebesar -2.315618 dan nilai probabilitas sebesar 0.0409. Disimpulkan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut terlihat dari realisasi PMDN tahun 2022 mencapai 65,4 triliun rupiah atau sebanyak 25.673 proyek, sehingga membuat realisasi PMDN menjadi tertinggi ketiga di Indonesia. Adanya proyek-proyek realisasi PMDN membuktikan bahwa telah menyerap banyak tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran pada tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya dari 5,74% menjadi 5,49%. Menurunnya tingkat pengangguran menjelaskan bahwa semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan sehingga meningkatkan taraf kemakmuran dan menekan proporsi penduduk miskin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur sudah menggunakan modal investasi dalam negeri secara efisien. Penggunaan investasi ini akan membuka kesempatan bagi penduduk miskin dan membuat pemerataan sehingga jarak ketimpangan antar golongan pendapatan mengecil. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wiganepdo & Soegoto (2022); Pratama et al. (2022); Agustini & Panca Kurniasih (2017), bahwa PMDN terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Investasi berupa PMDN adalah sebuah modal dalam membentuk keseimbangan pasar. Kegiatan penanaman modal yang digunakan secara efisien dan bersifat padat karya sehingga menyerap tenaga kerja secara produktif. Hal tersebut akan berdampak pada kenaikan pendapatan bagi orang miskin sehingga kualitas hidup diatas batas kemiskinan.

### Pengaruh Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Nilai t-hitung dari upah minimum sebesar -1.498092 dan nilai probabilitas sebesar 0.0959. Disimpulkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penduduk miskin. Dengan kata lain, upah minimum belum tentu dapat meminimalisir masalah kemiskinan. Upah minimum belum sepenuhnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut BPS, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan upah minimum terendah di Indonesia. Kenaikan upah minimum yang terjadi setiap tahunnya juga tidak sepadan dengan kenaikan inflasi di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022, inflasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 6,52%. Selain itu terjadi kenaikan upah minimum sebesar 1,2% dari tahun sebelumnya. Namun hal ini tidak menurunkan angka kemiskinan dikarenakan ketika harga kebutuhan sehari-hari naik, pekerja tetap tidak akan cukup untuk



memenuhi kebutuhannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, bahwa upah minimum ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terbebas dari kemiskinan. Temuan ini relevan dengan penelitian Putri & Putri (2021) dan Lestari & Susana (2021), bahwa upah minimum tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap masalah kemiskinan. Upah minimum yang meningkat dapat membantu mengurangi kemiskinan, Namun, ketika tingkat inflasi melebihi tingkat pertumbuhan upah, yang terjadi sebaliknya dimana upah yang ditawarkan tidak cukup bagi pekerja untuk menutupi biaya hidup pokok mereka.

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Nilai t-hitung dari pengeluaran pemerintah sebesar 2.390617 dan nilai probabilitas sebesar 0.0358. Disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah terdapat pengaruh yang signifikan dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada tren penurunan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Realisasi belanja daerah pada tahun 2022 mencapai 94,02% atau setara dengan 31,5 triliun rupiah. Provinsi Jawa Timur juga berada pada urutan ke-10 dengan realisasi belanja daerah terbanyak.

Salah satu realisasi belanja daerah adalah untuk pembangunan infrastruktur. Sektor infrastruktur berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja melalui proyek-proyek pembangunan. Infrastruktur juga berperan dalam menunjang mobilisasi barang/jasa maupun manusia sehingga hal ini akan membuat harga barang/jasa menjadi lebih terjangkau. Adanya infrastruktur yang memadai mampu menarik lebih banyak investor. Sebesar 20% dari APBD dialokasikan untuk pendidikan. Lalu pengeluaran pemerintah juga dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pengeluaran pemerintah juga dialokasikan untuk penguatan di bidang pendidikan maupun kesehatan dengan maksud menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat ditinjau dari IPM di Provinsi Jawa Timur yang naik pada tahun 2022 mencapai 72,75 dan termasuk dalam kategori IPM tinggi. Artinya, pemerintah telah menggunakan pengeluaran pemerintah secara optimal sebagai upaya meningkatkan IPM di Provinsi Jawa Timur. IPM yang meningkat akan berdampak positif pada produktivitas masyarakat. Produktivitas yang meningkat akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, dan berimplikasi pada penurunan penduduk miskin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Akbar & Priana (2023) dan Nasution et al. (2023), ketika pengeluaran pemerintah meningkat akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Adanya pengeluaran pemerintah digunakan secara efisien dan efektif untuk konsumsi sektor publik dalam bentuk subsidi sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih produktif sehingga memiliki penghasilan untuk keluar dari garis kemiskinan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dapat melalui pengoptimalan investasi dalam negeri dan pengeluaran pemerintah. Estimasi model persamaan simultan menginterpretasikan bahwa investasi dalam negeri dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal tersebut sejalan dengan hipotesis awal. Artinya, ketika investasi dalam negeri dan pengeluaran pemerintah meningkat maka akan menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penggunaan investasi secara efisien digunakan untuk membuka lapangan kerja dengan pendapatan yang layak sehingga penduduk miskin memperoleh pekerjaan dan berkesempatan dalam meningkatkan taraf hidup. Adanya pengeluaran pemerintah yang digunakan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara optimal juga menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Namun adanya upah minimum tidak berpengaruh yang signifikan terhadap penduduk miskin. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal. Nyatanya upah minimum yang naik setiap tahunnya tidak menekan penduduk miskin dikarenakan tingkat inflasi yang ikut naik setiap tahunnya, sehingga penduduk miskin akan tetap tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena lonjakan harga barang.

Pemerintah dapat menimbang hasil penelitian ini guna merancang intervensi yang akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, pemerintah harus mengelola modal investasi dengan cara melakukan pendistribusian pada sektor-sektor ekonomi di setiap kabupaten/kota secara efisien. Dengan adanya modal yang merata, maka ketersediaan lapangan kerja juga akan meningkat dan hal ini akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih meluas. Dalam konteks tersebut, diperlukan penguatan lebih lanjut terhadap potensi ekonomi lokal, mengingat ketidakpastian situasi ekonomi global. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan juga dapat mengalokasikan dan merealisasikan pengeluaran pemerintah secara maksimal dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pada sektor pendidikan serta kesehatan sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian dan menurunkan kemiskinan. Perlu adanya keberpihakan kepada masyarakat dalam mengurangi adanya rigiditas pendistribusian anggaran sehingga dapat digunakan secara efisien untuk memberdayakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Y., & Panca Kurniasih, E. (2017). Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 97. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i2.22986>

- Akbar, F. D., & Priana, W. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Randai*, 3(2), 25–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/randai.3.2.p.25-33>
- Alvin, & Hukom, A. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2022. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 29(1), 85–96. <https://doi.org/10.59725/ema.v29i1.75>
- Annisa, N., & Anwar, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Provinsi Aceh). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 4(3), 1. <https://doi.org/10.29103/jeru.v4i3.6056>
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Houghton, J., & Khandker, S. R. (2012). *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7721>
- Jhingan, M. . (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah Dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lestari, S., & Susana, R. R. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Mizan*, 4(Juli 2021), 56–70.
- Mangkoesebroto, G. (2014). *Ekonomi Publik (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi 7)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mubyarto. (2004). *Teori Ekonomi Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Murni, A. (2016). *Ekonomika Makro (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nasution, R. A., Silaban, S. J., & Humairah, Z. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2(2), 206–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i2.1562>
- Pratama, A. A., Lathifah, I. L., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2011-2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 179–188.
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan*

- Pembangunan*, 10(2), 106. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00>
- Risdiyanto, E., Mollet, J. A., & Hutajulu, H. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1813–1822. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12>
- Suparmoko, M. (2016). *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktik (Edisi Keenam)*. Yogyakarta: BPFE.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic Development*. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Wiadnyana, I. G. A. N. B., & Hadiyati, S. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *J-MAS : Jurnal Manajemen Dan Sains*, 8(1), 722–731. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.866>
- Wicaksana, W. A., & Primandhana, W. P. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Sektor Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 3363. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i3.4067>
- Wiganepdo, S., & Soegoto, H. (2022). Peran PMDN dan PMA Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia. *JURISMA : Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/jurisma.v12i1.5838>
- Yustika, A. E. (2006). *PEREKONOMIAN INDONESIA : Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*. Malang: Bayumedia Publishing.